

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan ruang lingkup penelitian saja, hal ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian yang dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. Sebelumnya terdapat 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua namun dengan adanya pemekaran wilayah dengan diberlakukannya Daerah Otonomi Baru (DOB) yang disahkan pada tahun 2022 maka terjadi perubahan cakupan wilayah di Provinsi Papua. Berikut penjelasan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DOB :

1. UU Nomor 14 Tahun 2022 mengatur pembentukan Provinsi Papua Selatan, cakupan wilayahnya yaitu Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.
2. UU Nomor 15 Tahun 2022 mengatur pembentukan Provinsi Papua Tengah, cakupan wilayahnya yaitu Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Deyiai, Intan Jaya, Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya.
3. UU Nomor 16 Tahun 2022 mengatur pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, cakupan wilayahnya yaitu Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) membuat wilayah di Provinsi Papua sekarang hanya tersisa 9 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura. Oleh sebab itu, terjadi pembatasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini dengan objek penelitian sebanyak 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2019-2022.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua yakni sebanyak 9 pemerintah kabupaten/kota antara lain Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Menurut Sugiyono (2013:37), hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel (x) yaitu ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan spi terhadap variabel (y) yaitu kinerja keuangan. (Izaturrohman, 2018)

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono (2017:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua yang memiliki data laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan pada tahun 2019-2022. Menurut Sugiono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Kusumasari, 2020)

Penelitian ini menggunakan metode sensus dimana objek penelitiannya adalah seluruh populasi yaitu Pemerintah Daerah di Provinsi Papua diantaranya Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik menurut Indriantoro (2016:12), data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah tersedia sehingga tidak perlu lagi dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder meliputi data laporan keuangan Pemda dan laporan keuangan yang sudah diaudit

BPK. Sumber data berasal dari website Kementerian Keuangan, dan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Provinsi Papua. (Kusumasari, 2020)

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono 2017:329). Data berupa dokumen dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Provinsi Papua.
2. Data kepustakaan yaitu pengambilan data yang diperoleh dari buku, dokumen, jurnal, artikel serta sumber lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Data kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses dan mengunduh laporan keuangan tahun 2019-2022, yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id dan website Badan Pemeriksa Keuangan yaitu www.bpk.go.id atau www.bpkad.papua.go.id.

3.7 Variabel Penelitian

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

3.7.1 Variabel Dependen (terikat)

Kusumasari (2020) menyatakan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, Sugiyono (2017:59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua.

3.7.2 Variabel Independen (mengikat)

Kusumasari (2020) menyatakan variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi bab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat, Sugiyono (2017:59). Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, temuan audit atas kepatuhan dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal.

3.8 Definisi Operasional Variabel

3.8.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pradana et al (2022) menyatakan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan pada laporan keuangan pemerintah daerah sebagai indikator. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan memanfaatkan rasio efektivitas. Efektivitas merupakan ukuran suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuan-tujuannya, Mardiasmo (2009: 134). Taek (2019) menyatakan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom (EKD) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan

asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan pendapatan asli daerah.

3.8.2 Ukuran Pemerintah Daerah

Kusumasari (2020) menyatakan ukuran pemerintah daerah adalah ukuran nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu, ukuran pemerintah menunjukkan besar kecilnya pemerintahan tersebut. Variabel ukuran pemerintah daerah diukur dengan menggunakan Ln (Total Aset). Total aset dapat diperoleh didalam laporan neraca daerah.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Nomor 7 pada Paragraf 38 diketahui bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah daerah terdiri dari aset lancar dan aset non lancar (investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya). (Yamin, 2021)

3.8.3 Kemakmuran

Kemakmuran dalam penelitian ini diproyeksikan dengan pendapatan asli daerah sebab semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Hutagalung (2016) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

- 1) Hasil Pajak Daerah UU No. 28/ 2009 menjelaskan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Hasil Retribusi Daerah. Setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penelitian ini kemakmuran diukur dengan menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan.
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Milik Daerah yang Dipisahkan.
- 4) PendapatanLain-Lain Asli Daerah yang Sah. PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3.8.4 Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Dalam mengukur tingkat ketergantungan proksi yang

digunakan yaitu perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan.

Hutagalung (2016) menyatakan dana perimbangan meliputi:

1) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum terdiri dari DAU untuk Daerah Provinsi dan DAU untuk Daerah Kabupaten/Kota.

2) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/ kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana perimbangan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya, Bagi Daerah, Dana perimbangan

merupakan suatu yang sangat berarti dalam peningkatan kapasitas daerah dalam pelayanan publik, pelayanan masyarakat akan semakin baik. Cakupan dan jangkauan pelayanan semakin luas dan dekat dengan masyarakat yang dilayani. Dengan demikian, harapan kesejahteraan masyarakat sangat memungkinkan diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal yang memuat hubungan (perimbangan) keuangan antara pusat dan daerah

3.8.5 Temuan Audit Atas Kepatuhan

Mulyadi (2011:30-32) Audit kepatuhan adalah audit yang bertujuan untuk menentukan apakah objek yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria, dalam hal ini biasanya pemerintah. Jumlah temuan audit atas kepatuhan berarti mengindikasikan jumlah item yang menjadi temuan dalam audit kepatuhan yang diselenggarakan oleh BPK. (Alfiani et al., 2017).

Untuk mengetahui temuan audit suatu daerah dapat dilakukan dengan memberikan opini atas temuan audit, jika Opini Tanpa Memberikan Pendapat (Disclaimer), diberi skor 0 (nol), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi skor 1 (satu), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi skor 2 . Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Kusumasari (2020), Marfiana & Kurniasih (2013), Noviyanti & Kiswanto (2016) yaitu dengan menggunakan jumlah temuan audit pemeriksaan BPK atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku sebagai proksi dalam mengukur temuan audit.

3.8.6 Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Internal

Bastian (2013:316) Temuan audit atas SPI adalah hasil audit yang menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Jumlah temuan audit atas SPI berarti mengindikasikan jumlah item yang menjadi temuan dalam audit terhadap sistem pengendalian intern yang diselenggarakan oleh BPK. (Alfiani et al., 2017).

Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Alfiani et al (2017) yaitu dengan menggunakan jumlah temuan audit pemeriksaan BPK atas keandalan sistem pengendalian internal yang berlaku sebagai proksi dalam pengukuran.

3.9 Pengukuran Variabel

3.9.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio efektivitas sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}}$$

Sumber: (Pradana et al., 2022)

Taek (2019) menyatakan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Berikut

kriteria/skala rasio efektivitas kinerja keuangan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tumija dan Sinta, 2022) :

- a) Sangat Efektif : > 100%
- b) Efektif : 100%
- c) Cukup Efektif : 90-99%
- d) Kurang Efektif : 75-89%
- e) Tidak Efektif : < 75%

3.9.2 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah sebagai indikator dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \ln(\text{Total Aset})$$

Sumber: (Pradana et al., 2022)

Dengan menggunakan skala rasio menurut penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Rahmawaty (2020), Pradana et al (2022) juga menyatakan pengukuran pada ukuran pemerintah daerah menggunakan kriteria/skala rasio efektifitas.

3.9.3 Kemakmuran

Kemakmuran sebagai indikator dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kemakmuran} = \text{Log. n (PAD)}$$

Sumber: (Pradana et al., 2022)

Dengan menggunakan skala rasio menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aulia dan Rahmawaty, 2020), Pradana et al (2022) juga menyatakan pengukuran

pada kemakmuran menggunakan kriteria/skala rasio efektifitas. Semakin tinggi PAD menandakan semakin bagus kinerja suatu pemerintah daerah.

3.9.4 Tingkat Ketergantungan

Tingkat Ketergantungan sebagai indikator diukur dengan total dana perimbangan dan total pendapatan. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian Pradana et al (2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Tamara (2018) dan Dasmar et al (2020) menyatakan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat yaitu (80%-98%).

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \text{Total Dana Perimbangan} / \text{Total pendapatan}$$

Sumber: (Pradana et al., 2022)

3.9.5 Temuan Audit Atas Kepatuhan

Kusumasari (2020) menyatakan rentang jumlah temuan kasus untuk menentukan klasifikasi banyak atau sedikitnya temuan audit dalam penelitian adalah dengan menggunakan nilai rata-rata temuan kasus kelemahan SPI di seluruh pemerintah daerah sampel. Dalam penelitian ini temuan audit diklasifikasikan dengan menggunakan skala 3 poin yaitu dengan melihat jika rentang jumlah temuan lebih banyak maka nilai 1, jika rentang jumlah temuan sama dengan nilai rata-rata maka klasifikasi temuan sedang maka nilai 2, dan jika rentang jumlah temuan lebih kecil dari nilai rata-rata maka dikatakan memiliki klasifikasi sedikit maka diberi nilai 3.

$$\text{Kepatuhan} = \text{Jumlah Temuan Kepatuhan}$$

Sumber: (Alfiani et al., 2017)

3.9.6 Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Internal

$$\text{SPI} = \text{Jumlah temuan SPI}$$

Sumber: (Pradana et al., 2022)

3.10 Teknik Analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan alat statistik yaitu program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) digunakan untuk mendokumentasikan, dan menganalisis data. Jonathan Sarwono (2006) menyatakan SPSS adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan program komputer. Kelebihan dari SPSS adalah penggunaanya dapat melakukan perhitungan statistik secara lebih cepat dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun. Adapun teknik-teknik analisis yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

3.10.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Uji Asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS (*ordinary least square*) agar model tersebut valid sebagai alat ukur. Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari gejala heterokedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi.

Model dapat dijadikan alat estimasi jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*best linear unbiased estimator*). Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. (Kusumasari, 2020)

3.10.1.1 Uji Normalitas

Kusumasari (2020) Uji Normalitas digunakan untuk menguji variabel data bebas dan variabel data terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak normal menurut Danang Sunyoto (2016:92). Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel data bebas dan variabel data terikat berdistribusi mendekati normal. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality* Kolmogorov-Smirnov dan juga dengan grafik *Normal Probability Plot*. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov, pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil signifikansi menunjukkan nilai signifikan $> 0,05$ maka data residual terdistribusi dengan normal.
2. Jika hasil signifikansi menunjukkan nilai signifikan $< 0,05$ maka data residual tidak terdistribusi dengan normal.

Untuk melihat apakah data berdistribusi normal dengan grafik Normal Probability Plot dapat dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data yang berupa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

2. Data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal apabila data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti arah garis diagonal.

3.10.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah uji asumsi klasik yang ditetapkan untuk menganalisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas di mana akan diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi menurut Danang Sunyoto (2016:87). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel ini tidak orthogonal, artinya variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk melihat apakah terjadi multikorelitas dalam model dapat dilihat dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan alat bantu berupa program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Deteksi multikorelitas dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut bisa dikatakan bebas dari multikolinieritas. (Kusumasari, 2020)

3.10.1.3 Uji Autokorelasi

Kusumasari (2020) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2018:110). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson hitung (d) dengan nilai

Durbin Watson Table, yaitu batas atas (d_U) dan batas bawah (d_L). Kriteria yang digunakan untuk menjadi patokan adalah sebagai berikut:

1. Bila $d < d_L$, maka ada korelasi yang positif.
2. Bila $d_L \leq d \leq d_U$, maka tidak dapat diambil kesimpulan.
3. Bila $d_U \leq d \leq 4 - d_U$, maka ada korelasi yang positif maupun *negative*.
4. Bila $4 - d_U \leq d \leq -d_L$, maka tidak dapat diambil kesimpulan.
5. Bila $d > 4 - d_L$, maka ada korelasi *negative*.

3.10.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian dari sisa antar observasi satu dengan yang lainnya menurut Danang Sunyoto (2016:90). Jika residunya mempunyai varian yang sama maka disebut Homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama maka disebut Heteroskedastisitas. Sebuah model regresi yang baik adalah model yang memiliki data yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heterikedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi heterokedastisitas, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah distudentized (Ghozali, 2018:139). Homoskedastisitas terjadi jika pada stterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik orgin (0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik

dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dengan tingkat signifikan terhadap absolut residual diatas 5% maka kesimpulannya tidak terjadi heterokendastisitas. Namun jika tingkat signifikan dibawah 5%, maka ada gejala heterokendastisitas. (Kusumasari, 2020)

3.11 Pengujian Model Regresi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak (fit) untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

3.11.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Kusumasari (2020) Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti meramalkan keadaan variabel dependen, bila kedua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor yang dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2017:275). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda, yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah, temuan audit, dan sitem pengendalian internal.

Hubungan antar variabel dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ UPD} + \beta_2 \text{ KEMAKMURAN} + \beta_3 \text{ TK} + \beta_4 \text{ TPATUH} + \beta_5 \text{ TSPI} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kinerja keuangan

α : Konstan

β : Koefisien regresi variabel independen

UPD : Ukuran pemerintah daerah

TK : Tingkat ketergantungan

SPI : Temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal

Kepatuhan : Temuan audit atas kepatuhan

ε : Koefisien error

3.12 Pengujian Hipotesis

3.12.1 Analisis Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah yang memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai koefisien yang mendekati 1 artinya variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Kusumasari, 2020)

3.12.2 Uji signifikansi t (Uji Parsial)

Kusumasari (2020) Uji beda t-test digunakan untuk menguji berapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan didalam penelitian secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial menurut Ghozali

(2018:98), caranya dengan membandingkan dengan taraf signifikan atau 0,05.

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- a. Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berhubungan dengan ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu ukuran pemerintah, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.